

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini mengenai Problematika Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) *Koperasi Tacik Mori Ata Ngaran* di Pelabuhan II Labuan Bajo dalam terang Teori Keadilan John Rawls, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

pertama, Problematika utama yang dihadapi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan II Labuan Bajo meliputi persoalan ketidakstabilan pendapatan, minimnya perlindungan sosial, lemahnya posisi tawar pekerja, keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan, serta distribusi manfaat pembangunan yang belum merata. Meskipun pembangunan pelabuhan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara proporsional oleh para buruh sebagai pelaku utama aktivitas bongkar muat.

Kedua, Teori Keadilan John Rawls sangat relevan untuk disandingkan pada objek penelitian ini, untuk menjadi sebuah pisau bedah analisis, sebab teori tersebut menempatkan keadilan sebagai dasar utama dalam mengatur struktur sosial, distribusi manfaat ekonomi, serta perlindungan terhadap kelompok yang paling lemah dalam struktur ekonomi.

Melalui prinsip kebebasan yang setara, prinsip perbedaan dan prinsip kesempatan yang *fair*, dapat dilihat bahwa keadilan tidak hanya sebatas hasil akhir, melainkan juga menyangkut proses, kesempatan atau peluang posisi yang setara dan perlakuan yang diterima setiap orang secara sama. Dalam konteks Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Tacik Mori Ata Ngaran, prinsip kebebasan yang setara belum dapat terwujud sepenuhnya, terutama bilamana masih terdapat keterbatasan dalam menunjang hak-hak dasar TKBM itu sendiri, seperti hak untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi, lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap TKBM, dan ketimpangan relasi kuasa antara buruh dengan pihak pengelola jasa buruh.

Juga berdasarkan prinsip perbedaan (*difference principle*), ketimpangan ekonomi sejatinya hanya dapat dibenarkan apabila mampu memberikan manfaat terbesar, terutama bagi kelompok yang paling lemah dalam struktur ekonomi. Namun, realitas yang telah dipaparkan sebelumnya terkait kehidupan TKBM, ketimpangan yang ada dari segi pendapatan dan distribusi keuntungan pembangunan, belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja bongkar muat sebagai kelompok yang rentan atau berada pada posisi subordinat.

Juga, dalam prinsip kesempatan yang setara (*fair equality of opportunity*), mendorong adanya kesempatan yang setara bagi buruh untuk berkembang, memperoleh pelatihan, meningkatkan posisi kerja, serta mengakses informasi ekonomi belum berjalan optimal. Hambatan pendidikan, keterampilan, dan struktur organisasi masih menjadi faktor pembatas. Dengan demikian, penelitian ini hendak menegaskan bahwa sistem ketenagakerjaan TKBM di Pelabuhan II Labuan Bajo belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls, meskipun terdapat peluang besar untuk perbaikan melalui reformasi tata kelola, perlindungan pekerja, dan distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: *Pertama*, bagi pemerintah. Pemerintah daerah maupun instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap sistem ketenagakerjaan di sektor pelabuhan, terutama terkait standar upah layak, keselamatan kerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, dan penyelesaian permasalahan buruh, khususnya anggota tenaga kerja bongkar muat di koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran* Pelabuhan II, Labuan Bajo.

Kedua, Bagi Koperasi Pengelola TKBM. Pengelola Koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran* diharapkan menerapkan transparansi keuangan membuka ruang dialog dengan anggota TKBM, memperbaiki sistem pembagian pendapatan serta lebih intensif lagi mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

Ketiga, Bagi Para Buruh. Para tenaga kerja bongkar muat perlu memperkuat solidaritas internal, meningkatkan keterampilan kerja, serta memahami hak-hak normatif ketenagakerjaan agar memiliki posisi tawar yang lebih baik. Bagi penulis hal ini bersifat

urgen, sebab tuntutan normatif ketenagakerjaan di masa kini umumnya berjalan selaras dengan tuntutan kemajuan zaman.

keempat, bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji persoalan TKBM dari perspektif hukum ketenagakerjaan, ekonomi politik, sosiologi buruh, dan kebijakan publik maritim secara lebih baik.

5.3 penegasan Akhir atas Kesimpulan

Keadilan sosial bukan hanya cita-cita normatif, melainkan kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi akan kehilangan makna apabila tidak menghadirkan kesejahteraan bagi mereka yang bekerja di garis terdepan. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja bongkar muat sebagai penopang aktivitas ekonomi pelabuhan harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang bermartabat, setara, dan layak memperoleh keadilan.

Lampiran Foto Wawancara



1. Wawancara bersama Bpk. Laurensius Gabur, Bpk Yohanes Ranga Holo, dan Bpk. Hermanus Pamput (TKBM *Tacik Mori Ata Ngaran*)





2. Foto wawancara bersama staf administratif Koperasi *Tacik Mori Ata Ngaran* (Rian Nabun dan Nar Ludu)



DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PRIMER

Buku:

Agushamidah. *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Medan: USUpres, 2010.

Awaludin, Cand. *Buku Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Widina, 2025.

Bertens, Kees. *Pengantar Etika Bisnis: Seri Filsafat Atma Jaya 21 (Revisi)*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2024.

Bambang Suteng Sjuleman, “Ketidakadilan dan Kemiskinan dalam Bidang Politik”. dalam *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*. Johanes Hardimin, ed. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.

Bur Rasuanto. *Keadilan Sosial: Pandangan Tentang Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia, 2005.

Busro, Muhammad. *Teori-Teori Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

D. Novita, Mega. *Buku Etika dan Komunikasi Bisnis*. Siduarjo: Penerbit UWAIS, 2019.

Dionigi, Filipo and Kleidosty, Jeremy. *An Anlysis of John Rawls’s A Theory of Justice*. Inggris: Macat Library, 2017.

“Dokumen Struktur Kepengurusan TKBM Tacik Mori Ata Ngaran”

Eliarnov. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Eirlangga, 2006.

John Rawls (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo). *TEORI KEADILAN, DASAR-DASAR FILSAFAT POLITIK UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM NEGARA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Madung, Otto Gusti, ed. “Teori Keadilan Distributif John Rawls”, dalam Penerbit Ledalero dan Studia Ledalero. *Menalar Keadilan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.

Ndegong Madung, Otto Gusti. *Teori Keadilan Distributif John Rawls, Kritik dan Relevansinya*. Maumere: Penerbit Ledalero,

Rawls, John (Ed. Erin Kelly). *Justice As Fairness*. London: Harvard University Press, 2001.

Rusastra, I Wayan (Ed.). *Pengembangan Pelabuhan Berkelanjutan Investasi Swasta dan Peningkatan Daya Saing*. Jakarta: Penerbit Obor, 2020.

Syaukani, Gaffar, Afan, dan Rasyid, Ryaas. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Sunaryo. *Perihal Keadilan Keutamaan dan Dasar Hidup Bersama*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2021.
2022.

S.R., Soemarso. *Perpajakan Pendekatan Kompherensif*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2007.

Sastroadmojo, Sunarno. *Ekonomi Pariwisata*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.

Salvat, Pradikta Andi. *Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Penerbit Guepedia, 2022.

Wawan, Mas'udi dan Winanti, Poppy Sulistyaningsih. *Tata Kelola Covid-19 di Indonesia*. Gajah Mada University Express: Yogyakarta, 2020.

Wisnu, Dinna. *Politik Sistem Jaminan Sosial Menciptakan Rasa Aman dalam Sistem Ekonomi Pasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2012.

Wawancara:

Gabur, Laurensius (Anggota TKBM Tacik Mori Ata Ngaran, 52 tahun), wawancara langsung di Pelabuhan II Pelindo, 14 Desember 2025

Holo, Yohanes Ranga (43 tahun), wawancara langsung di Pelabuhan Pelindo Labuan Bajo, tgl. 14 Desember 2025.

Hermanus Pamput (51 tahun). Wawancara langsung di pelabuhan II Pelindo Labuan Bajo. pada 16 Desember 2025.

Kasur, Gordianus, (54 tahun). wawancara langsung di kediaman bapak Gordianus Kasur, 21 Januari 2026.

Nabun, Rian dan Ludu, Nar (Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat *Tacik Mori Ata Ngaran*). wawancara langsung di Kantor Sekretariat Koperasi Tacik Mori Ata Ngaran, 2 Januari 2026.

Setiawan, Ahmad (24 Tahun). Piskopal TKBM Pelabuhan Pelindo, Wawancara langsung di gerbang Pelabuhan II Pelindo Labuan Bajo.

Jurnal:

Budi Priyono Widya Zatayu. "Optimalisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Terhadap Kelancaran Bongkar Muat Petikemas Di PT Berlian Jasa Terminal Indonesia Cabang Surabaya Workforce." *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*. Volume 2, no. 6 (2018).

Faiz, Pan Mohamad. "TEORI KEADILAN JOHN RAWLS". *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, No 1, April 2009.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9:2, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Maret 2013.

Nakung, Demetrius Darmawan. "Kesetaraan Liberal Rawls, Dworkin dan Perdebatan Tentang Keadilan Distributif, Sebuah Pembacaan Kritis atas konsep liberal equality dalam buku Contemporary Political Philosophy karya Will Kymlicka".

Ndegong Madung, Otto Gusti. "KONSEP LIBERALISME POLITIK JOHN RAWLS SEBAGAI JAWABAN TERHADAP TANTANGAN MASYARAKAT PLURAL DAN KRITIK ATASNYA". *Jurnal DISKURSUS*, Volume 18, No. 2, Oktober 2022.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, No. 1. dikutip Meo, Bona Vantura. "Peran Civil Society Terhadap Demokratisasi Di Indonesia Sebagai Upaya Menciptakan Keadilan Sosial". Skripsi Institut Filsafat Katolik Ledalero, 2022.

Punandini, Dewi Asri dkk. Kesejahteraan Pekerja sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Media Akademik*. Volume 3, Nomor 7. Bandung: Universitas Islam Nusantara, April 2025.

Sunaryo. "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya". *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, No. 1. Jakarta, Maret 2022.

Subiyanto. "Peran Negara dalam ketenagakerjaan di Indonesia, dikutip Henny Natasya Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, dalam "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Sektor Informal dalam Perspektif Bekerjanya Hukum di Masyarakat", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No. 2. Fakultas Hukum Diponegoro, Oktober 2020.

SUMBER SEKUNDER

Internet:

Admin Flores Editorial. Dugaan 'sunat', Dana Buruh Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, Pakar Hukum: Pengurus TKBM Bisa Dipidana". 1 Maret 2021.
<https://www.floreseditorial.com/news/amp/pr-3972904259/dugaan-sunat-dana-buruh-pelabuhan-kelas-ii-labuan-bajo-pakar-hukum-pengurus-tkbm-bisa-dipidana>.

Badan Pusat Statistik Manggarai Barat . "Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Manggarai Barat Juli 2025". *Data BPS Manggarai Barat*.
<https://manggarai Barat.kab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/29/299/perkembangan-pariwisata-dan-transportasi-manggarai-barat-juli-2025.html> .

Bahar, Alvin. “Sejarah Labuan Bajo dari: Nama, Pesona Komodo, Sampai Pasir Warna Putih dan Pink.” *Hai Tech*. https://hai.grid.id/read/072457001/sejarah-labuan-bajo-dari-nama-pesona-komodo-sampai-pasir-warna-putih-dan-pink?page=all#goog_rewarded.

BPK RI. “UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. *Dokumen Nasional BPK RI*. <file:///C:/Users/User/Downloads/UU%20Nomor%2013%20Tahun%202003.pdf>.

“Buruh Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo Menjerit, Upah Belum Dibayar”. *Koran Metro 7. Online*. 31 Juli 2020. <https://metro7.co.id/nasional/nusa-tenggara-timur-ntt/buruh-pelabuhan-labuan-bajo-menjerit-upah-belum-dibayar/2020/>.

Darung, Venansius. “Nestapa Pekerja di Kota Super-Premium Labuan Bajo; Kerja Hingga 14 Jam per Hari, Upah Dirampok, dan Minim Perlindungan”. 21 Agustus 2025. *Floresia Kritis.Independen*. <https://floresia.co/reportase/peristiwa/77908/2025/08/21/nestapa-pekerja-di-kota-pariwisata-super-premium-labuan-bajo-kerja-hingga-14-jam-sehari-upah-dirampok-minim-perlindungan>.

Hartono, Doroteus. “Demonstrasi Peringatan *May Day* di Labuan Bajo, Manggarai Barat; Organisasi Buruh Desak Pemerintah Daerah Tetapkan UMK dan Jamin Keselamatan Para Pekerja”, dalam *Harian Online FLORESA KRITIS, INDEPENDEN*. 3 Mei 2025. <https://floresia.co/reportase/mendalam/75719/2025/05/03/demonstrasi-peringatan-may-day-di-labuan-bajo-manggarai-barat-organisasi-buruh-desak-pemerintah-daerah-tetapkan-umk-dan-jaminan-keselamatan-para-pekerja>.

JDIH BPK. “Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2001”. *JDIH BPK Database Peraturan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021>.

Mediana. “Upah Minimum Disalahgunakan untuk Buruh Bermasa Kerja Lebih dari Setahun”. *Harian Kompas*. 23 Nov 2023, <https://www.kompas.id/artikel/ump-disalahgunakan-untuk-upah-rendah> ”.

Nugroho, Agung. “Lapangan Kerja Informal dan Upah Kurang Layak Picu Overwork di Indonesia”. *Universitas Gajajh Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/lapangan-kerja-informal-dan-upah-kurang-layak-picu-overwork-di-indonesia/>

Perkasa, Robert. “Buruh Pelabuhan TKBM Labuan Bajo Gelar Aksi Menolak Pasal 4 Rancangan Permenaker”. *harian Oke Bajo*. 24 Februari 2023. <https://okebajo.com/2024/02/03/buruh-tkbm-pelabuhan-labuan-bajo-gelar-aksi-menolak-pasal-4-rancangan-permennaker/>.

Phaty, Pedy. “Seluruh Anggota TKBM Pelabuhan Labuan Bajo Peserta BPJS Ketenagkerjaan”. *Harian Online Oke Bajo*. 21 Maret 2023. <https://okebajo.com/2023/03/21/seluruh-anggota-koperasi-tkbm-pelabuhan-labuan-bajo-peserta-bpjs-ketenagakerjaan/>.

Sie Publikasi UNTAR. “Hak sebagai Truf: Konsep Keadilan Menurut Ronald Dworkin dalam Negara Hukum. *UNTAR Fakultas Hukum*. <https://fh.untar.ac.id/2025/06/19/hak-sebagai-truf-konsep-keadilan-menurut-ronald-dworkin-dalam-negara-hukum/>.

Silvester, Nabar. "TARIF KOPERASI TKBM TINGGI, BURUH DAN KONSUMEN JADI KORBAN". *Swara NTT Kantor Berita*, 31 Juli 2020. <https://www.swarantt.net/tarif-koperasi-tkbm-tinggi-buruh-dan-konsumen-jadi-korban-2/>.

Satria, Gerasimos. "Nasib TKBM di Labuan Bajo Tidak Terurus". *Victory News Manggarai Barat*. 24 Februari 2023. <https://okebajo.com/2024/02/03/buruh-tkbm-pelabuhan-labuan-bajo-gelar-aksi-menolak-pasal-4-rancangan-permennaker/>.

Wijaya, Frenky Tanny. "Dinasti Politik di Indonesia, Praktik Lumrah Para Politikus". *Harian Kompas*. 04 Februari 2024. <https://www.kompas.id/artikel/dinasti-politik-di-Indonesia-praktik-lumrah-para-politisi>.